



## PETUNJUK TEKNIS

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM







## PETUNJUK TEKNIS

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

# Daftar Isi

## BAB 1

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-4</b>
A. Latar Belakang .....	2-3
B. Tujuan Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi PPKE .....	3-4

## BAB 2

### **PILAR KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM**

<b>PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM</b> .....	<b>5-10</b>
A. Pilar Kebijakan .....	6-7
B. Strategi dan Program .....	8-10

## BAB 3

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI** .....

<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b> .....	<b>11-18</b>
A. Tujuan dan Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi .....	12-13
B. Cara Melakukan Pemantauan dan Evaluasi .....	13-14
C. Pelaksana .....	15
D. Laporan .....	15-16
E. Komponen dan Indikator Capaian .....	17-18

## BAB 4

### **PENUTUP** .....

### **LAMPIRAN** .....

#### **Lampiran 1.**

Indikator Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pusat dan Daerah .....	22-38
--	-------

#### **Lampiran 2.**

Contoh Instrumen Pemantauan dan Evaluasi .....	39-44
--	-------

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

- a. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,54% atau sebanyak 26,16 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,04% atau sebanyak 5,59 juta jiwa, yang merupakan bagian dari penduduk miskin (BPS, 2022).
- b. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030.
- c. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- d. Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, wilayah prioritas telah ditentukan dan akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/

Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi.
  2. Tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi (termasuk wilayah prioritas tahun 2021).
  3. Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencakup 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
- e. Pemantauan dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk memastikan kebijakan dan program PPKE berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi PPKE**

- a. Petunjuk teknis dapat digunakan oleh kementerian/ lembaga untuk menjadi acuan dan tuntunan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan capaian target program-program PPKE, seperti pemantauan terhadap Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), atau program pemberdayaan ekonomi lainnya.
- b. Petunjuk teknis ini juga dapat digunakan sebagai acuan dan tuntunan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program PPKE dari kementerian/ lembaga maupun program-program inisiatif daerah terkait PPKE.

- c. Data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi akan dijadikan bahan pembelajaran untuk mengambil langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program ke depannya.



## **BAB 2**

# **PILAR KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

## A. Pilar Kebijakan

Upaya mewujudkan PPKE tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah, (ii) keterpaduan program, anggaran, dan sasaran, serta (iii) pemantauan dan evaluasi.

### a. Pilar I: Komitmen Pemerintah

1. Program dan kegiatan dalam mendukung PPKE tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024.
2. Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.

### b. Pilar II Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran

1. **Tingkat pusat**, melalui:
  - Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib.
  - Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan.
  - Pengalokasian APBN termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan.
  - Pemutakhiran data sasaran program.
  - Mendorong pelibatan sektor nonpemerintah (swasta dan/atau masyarakat).

- Memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, antara lain penduduk lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.

2. **Tingkat daerah**, melalui:

- Pengalokasian APBD terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan untuk mendukung program nasional.
- Penyusunan RKPD.
- Pemutakhiran data sasaran program.
- Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan.
- Inovasi program komplementer/inisiatif daerah.
- Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antarsektor terkait.
- Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor nonpemerintah.

**c. Pilar III: Pemantauan dan Evaluasi**

- Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.
- Evaluasi proses secara berkala terhadap capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.

## B. Strategi dan Program

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

### 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilisasi harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:

- a. **Bantuan sosial reguler**, seperti PKH, Program Sembako, dan PIP.
- b. **Bantuan sosial khusus**, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler, dan Bantuan Beras.
- c. **Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas dan lansia).
- d. **Subsidi energi**, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji.
- e. Pemberian **Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**.

## 2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. **Peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyedia infrastruktur dasar**, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai (PKT) desa dan sektor.
- b. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja dan program vokasi.
- c. **Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**, melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha.
- d. **Peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan**, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. **Pemenuhan pelayanan dasar**, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.

- b. **Peningkatan konektivitas antarwilayah**, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

## **BAB 3**

# **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

## A. Tujuan dan Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus terhadap perkembangan data dari program PPKE yang sedang dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang berkesinambungan.
- b. Data dalam kegiatan pemantauan dikumpulkan melalui metode ilmiah (kuantitatif atau kualitatif) dan tidak berdasarkan berita yang tidak jelas cara dan sumbernya, serta berpatokan pada kerangka logis dari program.
- c. Selain pemantauan, perlu dilakukan evaluasi proses yang berfokus pada implementasi untuk menentukan sejauh mana program PPKE telah mengikuti strategi yang tertuang dalam kerangka logis program dengan melihat input, aktivitas dan *output*. Hasil evaluasi proses menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program PPKE tersebut.
- d. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- e. Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor masing-masing program, data sekunder seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Potensi Desa (Podes), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), atau data-data lainnya.



- f. Tindak lanjut kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan program PPKE, termasuk pelaksanaannya.

## **B. Cara Melakukan Pemantauan dan Evaluasi**

Ada beberapa cara dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan dan capaian suatu program, yaitu:

- a. Menggunakan data-data dari dasbor, data sekunder dan dari kanal pengaduan.
- Pemantauan melalui dasbor dapat dilakukan secara rutin dan berkala untuk melihat proses dan kinerja yang sedang berjalan. Dasbor yang dimaksud adalah dasbor program yang dimiliki kementerian/ lembaga maupun dasbor lainnya.
  - Pemantauan terhadap capaian program juga dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder hasil survei dengan skala nasional seperti Susenas, Sakernas ataupun Podes.
  - Pemantauan juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi yang masuk ke dalam kanal pengaduan. Informasi tersebut bisa berupa saran, opini dan kendala pelaksanaan terhadap suatu program bantuan untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program.

- b. Laporan dari kementerian/lembaga dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, laporan mengenai program bantuan yang disampaikan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dalam suatu rapat koordinasi juga bisa menjadi bahan pemantauan dan evaluasi.
- c. Melakukan kegiatan/kunjungan ke lapangan. Pemantauan dalam bentuk kunjungan lapangan bertujuan untuk mendalami data dan informasi yang diperoleh melalui dasbor/data sekunder/kanal pengaduan serta mengidentifikasi tantangan dan strategi terkait PPKE di tingkat pusat dan daerah.

Aktivitas pengumpulan data/informasi dari kunjungan lapangan bisa dilakukan dengan:

- Mewawancarai narasumber kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan kunci yang bisa dikembangkan saat proses wawancara.
- Melakukan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan beberapa orang dengan latar belakang yang sama, misalnya diskusi kelompok dengan beberapa penerima program.
- Mengadakan observasi langsung. Pemantau mendapatkan informasi dari apa yang dilihat, didengar langsung dari tempat pelaksanaan program mengenai berbagai hal dari program tersebut.
- Survei kecil, misalnya dengan menggunakan kuesioner mewawancarai penerima program dalam jumlah kecil yang dipilih secara acak.

## C. Pelaksana

- a. Pemantauan dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PPKE di pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
- b. Pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan oleh masing-masing kementerian pelaksana program-program bantuan sosial maupun jaminan sosial pusat.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKE di provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.

## D. Laporan

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai pengendalian internal dan akuntabilitas program PPKE serta pembelajaran untuk perbaikan kebijakan dan program ke depannya.
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota disusun sebagai laporan untuk disampaikan kepada bupati/wali kota. Laporan dari kabupaten/kota tersebut selanjutnya diteruskan ke tingkat provinsi untuk dikonsolidasikan

dengan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kemudian disampaikan ke pemerintah pusat (sesuai mekanisme pelaporan pada Pedoman Umum PPKE).

- c. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kementerian/lembaga disusun sebagai laporan dan rekomendasi untuk perbaikan upaya PPKE yang disampaikan secara berkala kepada Kementerian Koordinator sesuai bidang yang dikoordinasikan.
- d. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi dari kementerian/lembaga beserta hasil pemantauan terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator kemudian dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## E. Komponen dan Indikator Capaian

Komponen pemantauan dan evaluasi mencakup:

a. Komponen pelaksanaan program terkait PPKE:

### 1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Bantuan Sosial

- Realisasi penyaluran manfaat program kepada penerima manfaat.
- Ketepatan waktu penyaluran manfaat program kepada penerima manfaat.
- Ketepatan sasaran (mengidentifikasi *inclusion* dan *exclusion error*).
- Ketepatan pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat.

### Jaminan Sosial

- Kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Subsidi Energi

- Ketepatan sasaran.

### 2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Efektivitas persiapan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
- Cakupan penerima manfaat program pemberdayaan.
- Kinerja/capaian program pemberdayaan.

### 3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan

- Ketersediaan akses transportasi dan layanan dasar.
  - Cakupan wilayah.
- b. Kelembagaan dan regulasi di daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
1. Keberadaan kelembagaan di daerah.
  2. Kebijakan dan regulasi terkait PPKE.
- c. Kolaborasi pemerintah daerah dengan nonpemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
- d. Indikator utama
1. Penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat nasional.
  2. Penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.
  3. Penetapan jumlah keluarga miskin ekstrem penerima program PPKE.

Perincian secara lengkap mengenai deskripsi indikator, target keseluruhan, dan sumber data yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BAB 4**

**PENUTUP**

Pemantauan dan evaluasi meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memperoleh informasi kemajuan pelaksanaan dan capaian program, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan.

Petunjuk Teknis ini diharapkan bisa membantu para pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang terarah dan menghasilkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan guna memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan kebijakan dan program terkait PPKE.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1.

### Indikator Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pusat dan Daerah

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat</b>							
<b>1.1 Bantuan sosial</b>							
<b>a. Program Indonesia Pintar (PIP)</b>	Jumlah total siswa dari keluarga miskin ekstrem penerima PIP	Memastikan semua siswa dari rumah tangga miskin ekstrem yang menerima PIP					1. Susenas 2. Dasbor 3. Laporan Hasil pemantauan lapangan
			Jumlah siswa perempuan dan laki-laki dari keluarga miskin ekstrem penerima PIP	Meningkatkan keterampilan siswa perempuan dari keluarga miskin ekstrem yang menerima PIP			
	Jumlah siswa penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem penerima PIP	Meningkatkan keterampilan siswa penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menerima PIP					1. Susenas 2. Dasbor 3. Laporan Hasil pemantauan lapangan

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
	Jumlah anak tidak sekolah (ATS) dari keluarga miskin ekstrem yang kembali bersekolah dan menerima PIP	Meningkatkan proporsi siswa dari keluarga miskin ekstrem yang kembali bersekolah dan menerima PIP					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
<b>b. Program Keluarga Harapan</b>	Jumlah total penerima keluarga miskin ekstrem penerima PKH	Memastikan semua keluarga miskin ekstrem yang memiliki komponen sebagai penerima PKH					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia yang menerima PKH	Meningkatkan keterwakilan keluarga miskin ekstrem dengan anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia sebagai penerima PKH					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPK	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
	Jumlah keluarga miskin ekstrem dengan kepala keluarga perempuan yang menerima PKH	Meningkatkan keterampilan keluarga miskin ekstrem dengan kepala keluarga perempuan sebagai penerima PKH					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan Hasil</li> <li>4. pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem dengan anggota keluarga anak usia sekolah yang bersekolah (SD/MI/ sederajat: SMP/MTs/ sederajat dan SMA/ SMK/MA/sederajat) dan menerima manfaat PKH	Meningkatkan keterampilan anak dari keluarga miskin ekstrem yang menerima PKH					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan Hasil</li> <li>4. pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem dengan anggota keluarga anak di bawah usia 6 tahun dan menerima manfaat PKH	Meningkatkan keterampilan anak di bawah 6 tahun dari keluarga miskin ekstrem yang menerima PKH					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan Hasil</li> <li>4. pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijaksanaan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>c. Program Sembako/ BPNP</b>	Jumlah total keluarga miskin ekstrem penerima Program Sembako	Memastikan semua keluarga miskin ekstrem menerima Program Sembako					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia yang menerima Program Sembako	Meningkatkan keterwakilan keluarga miskin ekstrem dengan anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia sebagai penerima Program Sembako					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem dengan kepala keluarga perempuan yang menerima Program Sembako	Meningkatkan keterampilan keluarga miskin ekstrem dengan kepala keluarga perempuan sebagai penerima Program Sembako					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dabor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>d. Program Subsidi Listrik</b>	Jumlah total keluarga miskin ekstrem pengguna listrik < 900W yang menerima subsidi listrik	Memastikan semua keluarga miskin ekstrem pengguna listrik < 900W menerima subsidi LPG dan listrik					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem pengguna listrik < 900W penerima subsidi listrik dipilah berdasarkan KK perempuan dan laki-laki	Meningkatkan keterwakilan keluarga miskin ekstrem pengguna listrik < 900W dengan KK perempuan sebagai penerima subsidi listrik					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan</li> </ol>
<b>e. Program Subsidi LPG</b>	Jumlah total keluarga miskin ekstrem pengguna LPG 3 kg sebagai penerima program	Memastikan semua keluarga miskin ekstrem pengguna LPG 3 kg sebagai penerima program.					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem pengguna LPG 3 kg dipilah KK perempuan dan laki-laki sebagai penerima program	Meningkatkan keterwakilan keluarga miskin ekstrem pengguna LPG 3 kg dengan KK perempuan sebagai penerima program					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>f. Program Bantuan Lanjut Usia (Lansia)</b>	Jumlah total lansia dari keluarga miskin ekstrem yang menerima program Bantuan Lanjut Usia	Memastikan semua lansia dari keluarga miskin ekstrem menjadi penerima program Bantuan Lanjut Usia					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah lansia perempuan dan laki-laki dari keluarga miskin ekstrem penerima program Bantuan Lanjut Usia	Meningkatkan keterwakilan lansia perempuan dari keluarga miskin ekstrem sebagai penerima program Bantuan Lanjut Usia					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah lansia penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menerima program Bantuan Lanjut Usia	Meningkatkan keterwakilan lansia penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menjadi penerima program Bantuan Lanjut Usia					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPK	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>g. Program Bantuan Penyandang Disabilitas</b>	<p>Jumlah total penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem penerima program Bantuan Penyandang Disabilitas</p>	<p>Memastikan semua penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem sebagai penerima program Bantuan Penyandang Disabilitas</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3.</li> </ol>
	<p>Jumlah penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem dan dipilah berdasarkan kategori anak, usia produktif, lansia, perempuan dan laki-laki penerima program Bantuan Penyandang Disabilitas</p>	<p>Meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas berdasarkan kategori anak, usia produktif, lansia dan perempuan sebagai penerima Program Bantuan Penyandang Disabilitas</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3.</li> </ol>
<b>h. Program Kartu Prakerja</b>	<p>Jumlah miskin ekstrem yang mendapatkan program Kartu Prakerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penerima perempuan dan laki-laki</li> <li>2. Jumlah penerima penyandang disabilitas</li> </ol>	<p>Memperluas kesempatan kelompok miskin ekstrem terhadap program Kartu Prakerja</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMO Prakerja</li> <li>2. SAKERNAS</li> <li>3. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>



Keputusan dan Program PPK	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>1.2 Jaminan Sosial</b>							
<b>a. PBI Jaminan Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah total PBI sasaran PPK</li> <li>Jumlah PBI perempuan dan laki-laki Ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua individu miskin dan miskin ekstrem menjadi PBI (perempuan dan laki-laki)</li> </ul>				<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasbor</li> <li>Laporan</li> <li>Susenas</li> </ol>	
<b>b. PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah PBI penyandang disabilitas</li> <li>Jumlah PBI Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan rentang usia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua pekerja miskin dan miskin ekstrem menjadi PBI Jamsos Ketenagakerjaan</li> </ul>					

Kebijakan dan Program PPK	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
<b>a. Program Padat Karya Tunai</b>	Jumlah keluarga miskin ekstrem yang menerima Program Padat Karya Tunai	Memastikan keluarga miskin ekstrem, sebagai penerima program untuk kegiatan yang tidak memerlukan keahlian/keterampilan					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah penerima Program Padat Karya Tunai dari keluarga miskin ekstrem dipilah berdasarkan perempuan dan laki-laki	Meningkatkan keterampilan perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem sebagai penerima Program Padat Karya Tunai					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menerima Program Padat Karya Tunai	Meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem sebagai penerima Program Padat Karya Tunai					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
<b>b. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b>	Jumlah dan proporsi memiliki usaha mikro dan kecil (dari rumah tangga desil 1-4) yang dapat mengakses program KUR	Meningkatkan akses terhadap KUR untuk pemilik usaha mikro dan kecil dari rumah tangga miskin ekstrem					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Hasil pemantauan lapangan SIKP</li> <li>3. SIKP</li> </ol>
<b>c. Program Ultra Mikro (UMI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah total keluarga miskin ekstrem yang menerima program Ultra Mikro (desil 1-4)</li> <li>• Jumlah penambahan kabupaten/kota yang dijangkau oleh program Ultra Mikro</li> <li>• Jumlah penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menerima program Ultra Mikro</li> <li>• Jumlah penerima program dari keluarga miskin ekstrem dipilah berdasarkan perempuan dan laki-laki</li> </ul>	Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin ekstrem terhadap kredit Ultra Mikro				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pemantauan lapangan OMSPAN</li> <li>2. OMSPAN</li> <li>3. SIKP</li> </ol>	

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
<b>d. Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah total keluarga miskin ekstrem yang menerima Program PNM Mekaar (desil 1-3)</li> <li>Jumlah penambahan kantor cabang yang dibuka di wilayah kemiskinan ekstrem</li> <li>Jumlah penyandang disabilitas dari keluarga miskin ekstrem yang menerima program PNM Mekaar</li> <li>Peningkatan kepemilikan aset yang dimiliki setelah menerima program PNM Mekaar</li> </ul>	Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin ekstrem di area kerja PNM Mekaar					1. Hasil pemantauan lapangan 2. Laporan PNM Mekaar

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>e. Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah individu miskin ekstrem yang menerima pelatihan dari berbagai program kementerian/ lembaga</li> <li>Jumlah kabupaten/ kota yang sudah terdapat program PLUT</li> </ul>	Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil terhadap pelatihan dan pendampingan usaha					<ol style="list-style-type: none"> <li>Sakernas</li> <li>Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
<b>3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan</b>							
<b>a. Pembangunan akses transportasi</b>	Perbaikan atau pembangunan jalan dan sarana transportasi di wilayah kantong kemiskinan	Memastikan terlaksananya perbaikan atau pembangunan jalan dan sarana transportasi di wilayah kantong kemiskinan					<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasbor</li> <li>Laporan Podes</li> <li>Susenas</li> </ol>
	Akses keluarga miskin ekstrem di wilayah kantong kemiskinan terhadap sarana transportasi	Meningkatkan akses keluarga miskin ekstrem di wilayah kantong kemiskinan terhadap sarana transportasi					<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasbor</li> <li>Laporan Podes</li> <li>Susenas</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPK	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>b. Pembangunan layanan dasar</b>	Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah kantong kemiskinan	Memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah kantong kemiskinan					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DASHBOARD</li> <li>2. Laporan Podes</li> <li>3. Podes</li> <li>4. Susenas</li> </ol>
	Ketersediaan air bersih, air minum layak dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan	Memastikan ketersediaan air bersih, air minum layak dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DASHBOARD</li> <li>2. Laporan Podes</li> <li>3. Podes</li> <li>4. Susenas</li> </ol>
	Jumlah rumah layak huni di wilayah kantong kemiskinan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni keluarga miskin ekstrem di wilayah kantong kemiskinan					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DASHBOARD</li> <li>2. Laporan Podes</li> <li>3. Podes</li> <li>4. Susenas</li> </ol>
	Akses keluarga miskin ekstrem terhadap layanan dasar	Meningkatnya akses keluarga miskin ekstrem terhadap Layanan dasar (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih dan layak dan sanitasi)					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DASHBOARD</li> <li>2. Laporan Podes</li> <li>3. Podes</li> <li>4. Susenas</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>4. Kelembagaan dan Regulasi di daerah untuk PPKE</b>							
<b>a. Kelembagaan</b>	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TKPK	Memastikan kabupaten/kota di wilayah prioritas memiliki TKPK					1. Laporan Hasil pemantauan lapangan 2. Laporan Hasil pemantauan lapangan
<b>b. Kebijakan dan regulasi PPKE</b>	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).	Memastikan kabupaten/kota di wilayah prioritas memiliki dokumen RPKD					1. Laporan Hasil pemantauan lapangan 2. Laporan Hasil pemantauan lapangan
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT)	Memastikan kabupaten/kota di wilayah prioritas memiliki dokumen RAT					1. Laporan Hasil pemantauan lapangan 2. Laporan Hasil pemantauan lapangan
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPzKD)	Memastikan kabupaten/kota di wilayah prioritas memiliki dokumen LPzKD					1. Laporan Hasil pemantauan lapangan 2. Laporan Hasil pemantauan lapangan

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>5. Kolaborasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</b>							
<b>a. Kolaborasi Pemerintah dengan Nonpemerintah</b>	Jumlah perjanjian kerja sama PPKE dengan nonpemerintah	Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama PPKE dengan nonpemerintah di wilayah prioritas PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3.</li> </ol>
	Jumlah perjanjian kerjasama PPKE dengan nonpemerintah yang menggunakan data P3KE sebagai acuan penargetan penerima program	Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama PPKE dengan nonpemerintah yang menggunakan data P3KE sebagai acuan penargetan penerima di wilayah prioritas PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3.</li> </ol>
	Jumlah alokasi anggaran dari nonpemerintah untuk PPKE	Meningkatkan jumlah alokasi anggaran dari nonpemerintah untuk PPKE di wilayah prioritas PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasbor</li> <li>2. Laporan Hasil pemantauan lapangan</li> <li>3.</li> </ol>



Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
<b>6. Indikator Utama PPKE</b>							
<b>a. Penghapusan kemiskinan ekstrem nasional</b>	Persentase kemiskinan ekstrem nasional berkurang setiap tahun	0% pada 2024					Susenas
<b>b. Penghapusan kemiskinan ekstrem di kab/kota</b>	Persentase kemiskinan ekstrem di tingkat kab/kota berkurang setiap tahun	0% pada 2024					Susenas
	Jumlah kab/kota yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem bertambah setiap tahun	514 kab/kota					Susenas
<b>c. Penetapan jumlah keluarga miskin ekstrem penerima program PPKE</b>	Jumlah keluarga miskin ekstrem sasaran PPKE	Memastikan semua keluarga miskin ekstrem sasaran PPKE menerima program					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan Hasil</li> <li>4. pemantauan lapangan</li> </ol>

Kebijakan dan Program PPKE	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian				Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	
	Jumlah keluarga miskin ekstrem penerima program PPKE yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia	Meningkatkan keterampilan keluarga miskin ekstrem yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia sebagai penerima program PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem penerima program PPKE dan dipilih berdasarkan Kepala Keluarga (KK) perempuan dan laki-laki	Meningkatkan keterampilan keluarga miskin ekstrem dengan KK perempuan sebagai penerima program PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>
	Jumlah keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program PPKE dan dipilih berdasarkan KK perempuan dan laki-laki	Mengurangi keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program PPKE					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susenas</li> <li>2. Dasbor</li> <li>3. Laporan</li> <li>4. Hasil pemantauan lapangan</li> </ol>

## Lampiran 2.

### Contoh Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

#### *Kuesioner Pemantauan Program Sembako Keluarga Penerima Manfaat (KPM)*

#### IP. INFORMASI PEWAWANCARA

<b>IP01</b>	Nama	
<b>IP02</b>	Instansi	
<b>IP03</b>	Posisi/jabatan	
<b>IP04</b>	Tanggal wawancara	□□/□□/□□□□

#### LK. LOKASI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN

<b>LK01</b>	Provinsi	
<b>LK02</b>	Kabupaten/Kota	
<b>LK03</b>	Kecamatan	
<b>LK04</b>	Kelurahan/Desa	
<b>LK05</b>	Alamat tempat tinggal	

#### IK. INFORMASI RESPONDEN

Responden adalah (a) Pasangan Kepala Keluarga atau (b) Kepala Keluarga atau (c) Anggota Keluarga lainnya yang berumur 18 tahun atau lebih yang dapat memberikan informasi.		
<b>IK01</b>	Nama responden	
<b>IK02</b>	Hubungan dengan kepala keluarga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala keluarga</li><li>2. Pasangan kepala keluarga</li><li>3. Anak kandung/tiri</li><li>4. Menantu</li><li>5. Orang tua</li><li>6. Lainnya _____</li></ol>

<b>IK03</b>	Jenis kelamin	1. Laki-laki                      2. Perempuan
<b>IK04</b>	NIK	_____
<b>IK05</b>	Usia	____ tahun

## PP. PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

<b>PP01</b>	Apakah Ibu/Bapak sudah menerima dana bantuan Program Sembako bulan ini?	1. Ya 2. Tidak → SELESAI
<b>PP02</b>	Berapa jumlah dana bantuan Program Sembako yang diterima bulan ini?	Rp. ____ . ____ . ____
<b>PP03</b>	Apa saja yang dibelanjakan dengan dana bantuan Program Sembako tersebut?	A. Beras/sagu/jagung pipilan B. Telur C. Ikan segar D. Daging ayam E. Daging sapi F. Kacang-kacangan G. Buah H. Sayur I. Kopi/teh J. Gula K. Minyak goreng L. Lainnya -----
<b>PP04</b>	Dimana Ibu/Bapak membelanjakan dana bantuan Program Sembako tersebut?	A. E-warong B. Warung/toko terdekat C. <i>Minimarket</i> D. Pasar E. Lainnya -----

<p><b>PP05</b></p>	<p>Apakah Ibu/Bapak memanfaatkan seluruh dana bantuan Program Sembako yang diterima dalam satu kali pembelanjaan?</p>	<p>1. Ya 2. Tidak</p>
<p><b>PP06</b></p>	<p>Selain Program Sembako, bantuan apa lagi yang diterima keluarga Ibu/Bapak?</p>	<p>A. Program Keluarga Harapan (PKH) B. Program Indonesia Pintar (PIP) C. Program JKN-KIS (PBI) D. Program Subsidi Listrik E. Program Kartu Pra Kerja F. Bantuan Usaha Mikro G. Bantuan sosial dari pemerintah daerah kabupaten/kota H. Bantuan sosial dari pemerintah daerah provinsi I. Lainnya _____</p>

**\*Kuesioner ini hanya merupakan contoh kuesioner yang dapat digunakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses pemantauan dan evaluasi masing-masing program PPKE.**

## Kuesioner Pemantauan Penerima Bantuan PNM Mekaar\*

### IP. INFORMASI PEWAWANCARA

<b>IP01</b>	Nama	
<b>IP02</b>	Instansi	
<b>IP03</b>	Posisi/jabatan	
<b>IP04</b>	Tanggal wawancara	□□ / □□ / □□□□

### LK. LOKASI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN

<b>LK01</b>	Provinsi	
<b>LK02</b>	Kabupaten/Kota	
<b>LK03</b>	Kecamatan	
<b>LK04</b>	Kelurahan/Desa	
<b>LK05</b>	Alamat tempat tinggal	

### IK. INFORMASI RESPONDEN

<b>IK01</b>	Nama pemilik usaha	
<b>IK02</b>	Hubungan dengan kepala keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala keluarga</li> <li>2. Pasangan kepala keluarga</li> <li>3. Anak kandung/tiri</li> <li>4. Menantu</li> <li>5. Orang tua</li> <li>6. Lainnya _____</li> </ol>
<b>IK03</b>	Jenis kelamin	1. Laki-laki                      2. Perempuan
<b>IK04</b>	Usia	□□ tahun
<b>IK05</b>	Nomor NIK	□□□□□□□□□□□□□□□□

## IU. IDENTITAS USAHA

<b>IU01</b>	Nama usaha	
<b>IU02</b>	Jenis usaha (menurut KBLI BPS)	
<b>IU03</b>	Alamat usaha	
<b>IU04</b>	NPWP pemilik usaha (jika ada)	
<b>IU05</b>	Legalitas usaha	A. SIUP B. TDP C. IUMK D. Lainnya _____
<b>IU06</b>	Sejak kapan mulai usaha ini?	___/___/____

## PB. PENYALURAN BANTUAN

<b>PB01</b>	Kapan mencairkan bantuan?	___/___/____
<b>PB02</b>	Nilai bantuan yang dapat dicairkan?	Rp. __.____.____
<b>PB03</b>	Nilai bantuan yang sudah dimanfaatkan?	Rp. __.____.____
<b>PB04</b>	Pemanfaatan bantuan untuk apa saja?	A. Modal kerja (bahan baku) Rp. __.____.____ B. Modal investasi (peralatan usaha) Rp. __.____.____
<b>PB05</b>	Jumlah tenaga kerja saat ini?	A. Laki-laki ____ B. Perempuan ____ C. Total ____

<p><b>PBo6</b></p>	<p>Apakah melakukan pemasaran <i>online</i> pada tiga bulan terakhir?</p>	<p>1. Ya                                2. Tidak</p>
<p><b>PBo7</b></p>	<p>Selain bantuan dari PNM Mekaar, bantuan lain apa saja yang diterima pelaku usaha (termasuk keluarga pelaku usaha)?</p>	<p>A. Program Keluarga Harapan (PKH)  B. Program Sembako/BPNT  C. Program Indonesia Pintar (PIP)  D. Program JKN-KIS (PBI)  E. Program Subsidi Listrik  F. Program Kartu Pra Kerja  G. Bantuan sosial dari pemerintah daerah kabupaten/kota  H. Bantuan sosial dari pemerintah daerah provinsi  I. Lainnya _____</p>

**\*Kuesioner ini hanya merupakan contoh kuesioner yang dapat digunakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses pemantauan dan evaluasi masing-masing program PPKE.**









Buku ini dicetak dan disebarluaskan oleh



**KEMENKO PMK**

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

